

## Implementasi Kebijakan Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo

Junaid<sup>1</sup>, Kodrat<sup>2</sup>, Sri Wahyuti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Veteran Palopo

E-mail: [junaid.syam@gmail.com](mailto:junaid.syam@gmail.com)<sup>1</sup>, [kodrat.r1962@gmail.com](mailto:kodrat.r1962@gmail.com)<sup>2</sup>, [asrysriwahyuti@gmail.com](mailto:asrysriwahyuti@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 15 Juni 2025

Revised: 28 Juni 2025

Accepted: 30 Juni 2025

**Keywords:** KOTAKU, Pemberdayaan Masyarakat, Permukiman Kumuh, Partisipasi, Implementasi Kebijakan.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh berbasis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Permukiman kumuh di wilayah ini ditandai oleh kepadatan penduduk tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, serta kondisi sanitasi yang buruk. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU dilakukan melalui tiga tahapan utama: perencanaan partisipatif, pelaksanaan fisik dan non-fisik, serta monitoring dan evaluasi. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta memperoleh manfaat langsung dari kegiatan padat karya. Pelaksanaan program berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur dan kebersihan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri. Evaluasi menunjukkan peningkatan kepuasan warga terhadap kondisi lingkungan mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam kebijakan penanganan permukiman kumuh berbasis komunitas.

### PENDAHULUAN

Permukiman kumuh di perkotaan menimbulkan berbagai masalah yang kompleks. Secara fisik, permukiman kumuh tidak hanya kurang menarik secara visual, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, karena kondisi yang kumuh dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dari perspektif sosial, permukiman kumuh berpotensi menimbulkan masalah sosial, mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat, serta mendorong kebiasaan hidup yang kurang sehat.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan isu serius yang memerlukan penanganan segera dengan solusi yang tepat dan bijaksana. Di Indonesia, permasalahan ini terutama terjadi di wilayah perkotaan dan menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh harus dilihat secara holistik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan,

ekonomi, dan sosial, sehingga solusi yang diterapkan dapat berdampak positif dan berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Palopo telah melaksanakan program "Kota Bebas Kumuh" atau dikenal dengan KOTAKU melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program KOTAKU merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan permukiman kumuh dengan tujuan mengubah kawasan kumuh menjadi permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni.

Menurut Farida (2016), program KOTAKU adalah proyek pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di 34 provinsi dengan cakupan 269 kota dan 11.067 kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini berkomitmen mewujudkan gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% sanitasi layak. Melalui sinergi kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, KOTAKU bertujuan mengembangkan permukiman yang produktif, berkelanjutan, dan layak huni.

Program KOTAKU juga melibatkan organisasi swadaya masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berperan penting dalam percepatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan permukiman kumuh. Kegiatan program ini meliputi pembangunan fisik dan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta peningkatan kualitas sosial masyarakat. Dengan pendekatan berbasis masyarakat, program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari KOTAKU adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi kerja sama kolaboratif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta, serta pembangunan berbasis partisipasi aktif masyarakat.

Program KOTAKU merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya, KOTAKU lebih menitikberatkan pada penanganan permukiman kumuh secara langsung dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya permasalahan permukiman kumuh yang masih menjadi tantangan di perkotaan, khususnya di Kota Palopo, penelitian ini tertarik untuk mengkaji pelaksanaan program KOTAKU sebagai upaya penanganan permukiman kumuh berbasis pemberdayaan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada berbagai teori dan studi terdahulu yang relevan guna membangun kerangka konseptual yang kuat dalam menganalisis implementasi kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Landasan teori disusun untuk menjelaskan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, penanganan permukiman kumuh, pendekatan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan Program KOTAKU itu sendiri.

### Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan melalui tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Birkland, 2016), implementasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kejelasan tujuan kebijakan, struktur institusional, dan kondisi sosial-politik di lapangan. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan konsep

*collaborative governance*, yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks perkotaan, sangat ditentukan oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan: pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Model ini menekankan pentingnya komunikasi, kapasitas bersama, dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan kebijakan.

#### **Penanganan Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh merupakan kawasan dengan kondisi lingkungan yang tidak layak huni, memiliki infrastruktur yang minim, serta rentan terhadap risiko kesehatan dan bencana. Berdasarkan UN-Habitat (2016), permukiman kumuh memiliki lima karakteristik utama: kepadatan penduduk tinggi, akses air bersih terbatas, sanitasi buruk, kualitas bangunan rendah, dan ketidakamanan kepemilikan lahan. Studi oleh Sridhar et al (2017) menekankan bahwa upaya penanganan kawasan kumuh harus mencakup pendekatan multidimensi yang menggabungkan peningkatan infrastruktur, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta perubahan perilaku masyarakat. Dalam konteks Indonesia, strategi penanganan permukiman kumuh tercermin dalam target 100-0-100 yang diusung oleh Program Kotaku: 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak.

#### **Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Program KOTAKU merupakan salah satu strategi nasional berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh. Program ini merupakan kelanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan dan menekankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta. Berdasarkan evaluasi Kementerian PUPR (2021), KOTAKU berhasil menurunkan luasan kawasan kumuh di beberapa kota dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Studi Pangondo et al. (2023) dalam *Jurnal Borneo Administrator* menegaskan pentingnya pendekatan *collaboration by design*, yaitu perencanaan dan pelaksanaan program yang didesain secara kolaboratif sejak awal agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan komunitas dalam menjaga keberlanjutan hasil intervensi, serta oleh kapasitas BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai pelaksana teknis di lapangan.

#### **Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi**

Pemberdayaan masyarakat menjadi inti dalam pelaksanaan Program Kotaku. Menurut Mansuri dan Rao (2013), pemberdayaan tidak hanya sebatas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, tetapi juga harus memberikan kontrol nyata terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Studi Putri et al. (2020) menunjukkan bahwa program penanganan kawasan kumuh yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat secara efektif cenderung lebih berkelanjutan karena menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan. Partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi juga terbukti meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program (Yuliani, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan realitas sosial secara mendalam berdasarkan fakta di lapangan melalui pengumpulan data secara naturalistik, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah penerima manfaat Program KOTAKU dan memiliki dinamika sosial yang relevan untuk dianalisis.

Penelitian dilakukan selama kurun waktu Juni 2024 sampai dengan Desember 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: a) Wawancara mendalam (*in-depth interview*): Dilakukan terhadap informan kunci seperti perwakilan Dinas PUPR Kota Palopo, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Ponjalae yang menjadi penerima manfaat program. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. b) Observasi langsung: Untuk mengamati kondisi lingkungan permukiman, infrastruktur yang dibangun melalui program KOTAKU, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dan c) Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen seperti laporan program, foto kegiatan, dan arsip pendukung lainnya yang relevan.

Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis kualitatif model Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga tahapan, yaitu: 1) Reduksi data: Menyaring, memilah, dan merangkum data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan implementasi Program KOTAKU. 2) Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel agar memudahkan dalam menarik kesimpulan, dan 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menyimpulkan makna data berdasarkan temuan yang telah dianalisis, serta melakukan pengecekan silang untuk memastikan validitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kelurahan Ponjalae dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Kelurahan Ponjalae merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang sebelumnya menghadapi permasalahan serius terkait permukiman kumuh. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan dokumentasi program, kawasan ini ditandai oleh kepadatan hunian, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan infrastruktur dasar lainnya.

Wawancara dengan warga menyebutkan bahwa sebelum program KOTAKU, wilayah ini sering mengalami genangan air, tumpukan sampah yang tidak terkelola, serta minimnya ruang terbuka. Hal ini sesuai dengan indikator permukiman kumuh menurut UN-Habitat (2016) dan studi Sridhar et al. (2017).

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Ponjalae turut memperparah situasi permukiman. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak tetap. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka dalam memperbaiki kondisi hunian secara mandiri. Banyak rumah dibangun secara swadaya tanpa perencanaan teknis yang baik, sehingga rawan terhadap kerusakan dan tidak memenuhi standar kelayakan hunian.

Dalam aspek kelembagaan, sebelum adanya intervensi Program KOTAKU, belum terdapat wadah masyarakat yang secara aktif mengorganisasi kegiatan lingkungan secara kolektif. Inisiatif perbaikan lingkungan cenderung bersifat individual dan tidak terkoordinasi. Akibatnya, masalah-masalah lingkungan seperti saluran air tersumbat, sampah menumpuk, serta area resapan air yang hilang tidak dapat diatasi secara menyeluruh.

Kondisi topografi Kelurahan Ponjalae yang berada di dataran rendah juga berkontribusi terhadap tingginya risiko banjir lokal, terutama saat musim hujan tiba. Kurangnya sistem drainase yang memadai membuat air menggenang dalam waktu yang lama. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa titik di kawasan ini bahkan mengalami genangan permanen karena saluran air yang tersumbat dan tidak terhubung ke sistem drainase kota.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan, ditemukan bahwa permasalahan lingkungan di kawasan ini telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun, namun keterbatasan anggaran dan koordinasi menjadi kendala utama. Program KOTAKU hadir sebagai

respon strategis yang tidak hanya membawa dana stimulan pembangunan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam merancang dan menjalankan solusi lokal secara partisipatif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kelurahan Ponjalae merupakan lokasi yang sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi sekaligus membuka ruang untuk mengkaji sejauh mana pendekatan pemberdayaan masyarakat mampu menjawab tantangan pembangunan permukiman berkelanjutan di kawasan perkotaan.

### **Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ponjalae**

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Ponjalae dilakukan melalui pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat yang bekerja sama dengan Dinas PUPR Kota Palopo. Proses implementasi terbagi dalam tiga tahapan:

#### **1. Perencanaan Partisipatif**

Dalam tahap ini, masyarakat terlibat aktif dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan riil warga yang kemudian difasilitasi oleh BKM dan tim fasilitator. Dalam proses penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman), masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga subjek aktif yang memiliki ruang untuk menyuarakan kebutuhan serta ide-ide mereka.

Musyawarah Kelurahan (Muskel) menjadi forum deliberatif yang sangat penting, karena di sinilah terjadi proses penyelarasan antara kebutuhan warga, rencana teknis pembangunan, serta ketersediaan anggaran. Hal ini sejalan dengan gagasan *collaborative governance* yang dikemukakan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), di mana keterlibatan aktor-aktor lokal dalam proses perencanaan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ini juga menunjukkan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana dijelaskan oleh Mansuri dan Rao (2013), yakni memberikan kendali nyata kepada warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Warga secara langsung menetapkan skala prioritas pembangunan—misalnya memilih pembangunan saluran drainase di RW 3 sebagai titik kritis penanganan banjir lokal. Kegiatan ini memperkuat *sense of ownership*, yang sangat penting untuk keberlanjutan hasil pembangunan setelah program berakhir.

Tim fasilitator lapangan yang berasal dari program KOTAKU juga memegang peran sentral dalam mendampingi masyarakat agar proses perencanaan berlangsung inklusif dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Pendekatan yang dilakukan bersifat bottom-up, di mana aspirasi warga dikumpulkan melalui FGD (*Focus Group Discussion*), pemetaan swadaya, dan survei kebutuhan lingkungan. Model ini memperlihatkan keterpaduan antara pendekatan teknis dan sosial dalam proses perencanaan, sebagaimana disarankan dalam evaluasi Program KOTAKU oleh Kementerian PUPR (2021), yang menekankan pentingnya *planning by community* untuk menjamin relevansi dan keberterimaan program.

Lebih jauh, proses ini menumbuhkan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, terutama BKM yang semakin terlatih dalam menyusun proposal kegiatan, membuat perencanaan anggaran, dan menyelenggarakan kegiatan partisipatif. Dalam hal ini, teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier juga relevan, di mana struktur institusional lokal—seperti BKM—menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan pusat dapat diadaptasi secara

efektif di level tapak.

## **2. Pelaksanaan Fisik dan Non-Fisik**

Kegiatan fisik yang dilaksanakan mencakup pembangunan drainase, paving jalan lingkungan, MCK komunal, serta tempat penampungan sampah. Di sisi lain, kegiatan non-fisik berupa pelatihan pengelolaan sampah, sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), dan penguatan kapasitas BKM. Warga juga dilibatkan dalam sistem padat karya sebagai tenaga pelaksana kegiatan fisik, yang memberikan dampak ekonomi langsung.

Pelaksanaan fisik program KOTAKU menunjukkan dampak langsung terhadap kualitas infrastruktur lingkungan di Kelurahan Ponjalae. Berdasarkan hasil observasi, pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter di RW 02 telah mengurangi intensitas genangan air secara signifikan. Warga menyampaikan bahwa sebelum program ini, air hujan sering menggenang hingga dua hari. Namun, setelah pembangunan drainase, air kini dapat mengalir dengan lancar ke saluran pembuangan utama dalam waktu kurang dari satu jam.

Pemasangan paving blok di gang-gang sempit juga mempermudah mobilitas warga, terutama anak-anak sekolah dan pedagang kaki lima. Selain itu, pembangunan MCK komunal yang terletak di dekat area pasar kecil sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses sanitasi di rumahnya. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyebutkan bahwa sebelum adanya MCK ini, warga harus menumpang ke rumah tetangga atau membuang hajat di sungai.

Di luar kegiatan fisik, aspek non-fisik dari program juga menunjukkan perubahan perilaku masyarakat. Pelatihan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh fasilitator lokal berhasil mendorong inisiatif warga untuk memilah sampah organik dan anorganik secara mandiri. Beberapa ibu rumah tangga bahkan mulai mengolah sampah organik menjadi kompos untuk tanaman hias dan sayur di halaman rumah.

Kegiatan sosialisasi PHBS juga menjadi momen edukatif penting yang membuka wawasan warga mengenai pentingnya mencuci tangan dengan sabun, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Salah satu indikator keberhasilan yang terpantau adalah berkurangnya kasus diare pada anak-anak, sebagaimana disampaikan oleh petugas puskesmas setempat.

Program padat karya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme partisipasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga yang terlibat sebagai pekerja harian. Mereka menerima upah harian yang dibiayai dari dana program, yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bagi warga dengan status pengangguran atau pekerjaan tidak tetap, kesempatan ini sangat berarti. Temuan ini menguatkan relevansi teori pemberdayaan dari Putri et al. (2020), yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif warga dalam pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kapasitas sosial komunitas.

Pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi ini menunjukkan bahwa Program KOTAKU tidak hanya fokus pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga mengedepankan transformasi sosial berbasis komunitas. Sinergi antara intervensi infrastruktur dan pendidikan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan di lingkungan kumuh perkotaan.

## **3. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dilakukan oleh BKM dan pihak kelurahan, sementara evaluasi rutin dilakukan oleh Dinas PUPR bersama Tim KOTAKU Kota Palopo. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepuasan warga terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

Proses monitoring dilaksanakan secara berkala oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan. Setiap tahap pelaksanaan fisik

program didokumentasikan dalam laporan mingguan yang dikirimkan kepada Dinas PUPR Kota Palopo dan Tim KOTAKU. Warga juga turut dilibatkan melalui forum evaluasi terbuka (musyawarah warga), di mana mereka diberi kesempatan memberikan masukan maupun kritik terhadap pelaksanaan program. Keterlibatan langsung masyarakat ini menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Evaluasi menyeluruh dilakukan oleh Tim KOTAKU Kota Palopo setiap akhir triwulan. Tim ini melakukan inspeksi lapangan, verifikasi dokumentasi, dan mengadakan wawancara dengan penerima manfaat. Hasil evaluasi pada akhir pelaksanaan program menunjukkan bahwa 87% warga merasakan perubahan positif terhadap kondisi permukiman mereka. Indikator perubahan tersebut meliputi perbaikan sistem drainase, peningkatan kebersihan lingkungan, kemudahan akses jalan, serta tersedianya fasilitas sanitasi yang layak.

Warga yang semula apatis terhadap kegiatan lingkungan, mulai menunjukkan antusiasme dengan ikut serta dalam kegiatan bersih lingkungan dan pengelolaan sampah. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa gang-gang kecil yang sebelumnya dipenuhi sampah kini telah dihias dengan pot bunga dan mural edukatif yang dibuat oleh warga secara swadaya. Perubahan ini mencerminkan adanya transformasi budaya lingkungan yang didorong oleh pendekatan partisipatif program KOTAKU.

Lebih jauh, dalam kerangka teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (dalam Birkland, 2016), proses monitoring dan evaluasi yang inklusif serta berbasis komunitas ini memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Kejelasan indikator keberhasilan, struktur monitoring yang melibatkan aktor lokal, dan kondisi sosial yang mendukung menjadi kombinasi kunci dalam mencapai tujuan program. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Namun demikian, beberapa kendala dalam proses monitoring juga ditemukan. Di antaranya adalah kurangnya tenaga pendamping teknis di lapangan serta keterbatasan pelatihan administratif bagi pengurus BKM. Akibatnya, beberapa laporan kegiatan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan rapi. Kendala ini menunjukkan perlunya penguatan aspek teknis dalam kapasitas kelembagaan lokal agar program dapat lebih optimal di masa mendatang. Secara umum, monitoring dan evaluasi dalam program KOTAKU di Kelurahan Ponjalae telah berjalan secara sistematis dan kolaboratif, menghasilkan umpan balik yang positif dari warga, sekaligus menjadi dasar perbaikan bagi program sejenis di lokasi lain.

## **KESIMPULAN**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diterapkan di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo, menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam menangani kawasan permukiman kumuh. Keberhasilan program ini terletak pada keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan partisipatif berhasil membangun rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal seperti BKM. Pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan drainase dan MCK komunal terbukti memperbaiki kondisi lingkungan, sementara pelatihan non-fisik mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Evaluasi program menunjukkan peningkatan kepuasan warga dan munculnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Namun demikian, beberapa tantangan tetap ada, terutama terkait kapasitas teknis dan administratif BKM yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, disarankan agar program serupa di masa depan memberikan perhatian lebih pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal serta keberlanjutan program pasca intervensi.

---

**DAFTAR REFERENSI**

- Birkland, T. A. (2016). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy Making*. Routledge.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Farida, U. (2016). *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Laporan Evaluasi Program KOTAKU Tahun 2021*.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank Publications.
- Pangondo, S., Rahmawati, D., & Yusuf, R. (2023). Collaboration by Design dalam Program KOTAKU. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 45–59.
- Putri, A. I., Nugroho, S. P., & Rahmawati, L. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis Pemberdayaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 112–128.
- Sridhar, K. S., Reddy, V. R., & Bandyopadhyay, S. (2017). Slum Improvement in India: A Policy and Institutional Framework. *Environment and Urbanization ASIA*, 8(1), 27–45.
- UN-Habitat. (2016). *World Cities Report 2016: Urbanization and Development – Emerging Futures*. United Nations Human Settlements Programme.
- Yuliani, D. (2019). Partisipasi Warga dalam Program Lingkungan Berkelanjutan. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 11(3), 181–190.